RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021. Program dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini disusun dengan tujuan dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian di Kabupaten Cirebon. Penyusunan ini tentunya masih ada kekurangan, oleh karena itu saran atau masukan yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Besar harapan kami, mudah-mudahan Rencana Kerja (Renja) ini dapat meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

Sumber, Juli 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon,

Dr. H. HARRY SAFARI M, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610815 198603 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **2**

DAFTAR ISI **3**

BAB I PENDAHULUAN **4**

1.1. Latar Belakang..... 4

1.2. Landasan Hukum 6

1.3. Maksud dan Tujuan..... 9

1.4. Sistematika Penulisan 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **11**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Diskominfo Kabupaten Cirebon 11

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfo Kabupaten Cirebon 17

2.3. Isu-Isu Penting Penganggaran Tugas & Fungsi Diskominfo Kabupaten Cirebon 26

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 28

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .. 37

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **38**

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 38

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 40

3.3 Program dan Kegiatan 42

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **45**

BAB V PENUTUP **55**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan komunikasi dan informasi, urusan statistik dan urusan persandian, dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang Komunikasi dan Informatika. Dengan terbentuknya dinas ini, diharapkan masyarakat memperoleh dan memanfaatkan informasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan sedangkan bagi pemerintah diharapkan terwujudnya implementasi *e-government.*

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu adanya rencana strategis bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon berkewajiban menyusun rencana strategis. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), yang berbunyi : "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 273 ayat (1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Keterkaitan antara RPJMD dan Renstra dalam sistem perencanaan pembangunan dapat dilihat pada Gambar 1.1.

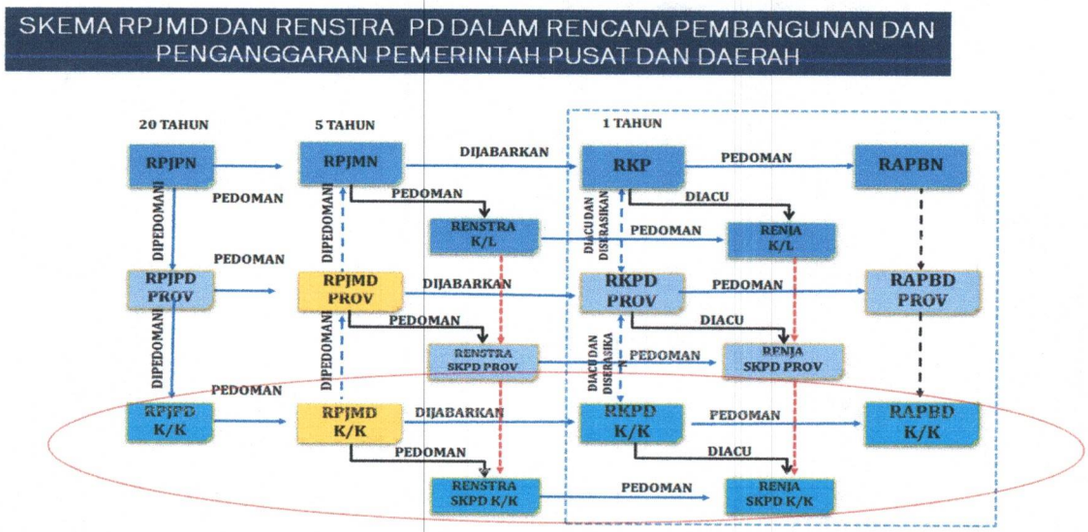

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Bagan diatas menunjukkan alur penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Dokumen Renstra Perangkat Daerah adalah penjabaran RPJMD, terkait dengan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mendukung prioritas Bupati. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode (satu) tahun. Berikut bagan alir penyusunan Renja dapat dilihat pada gambar berikut.

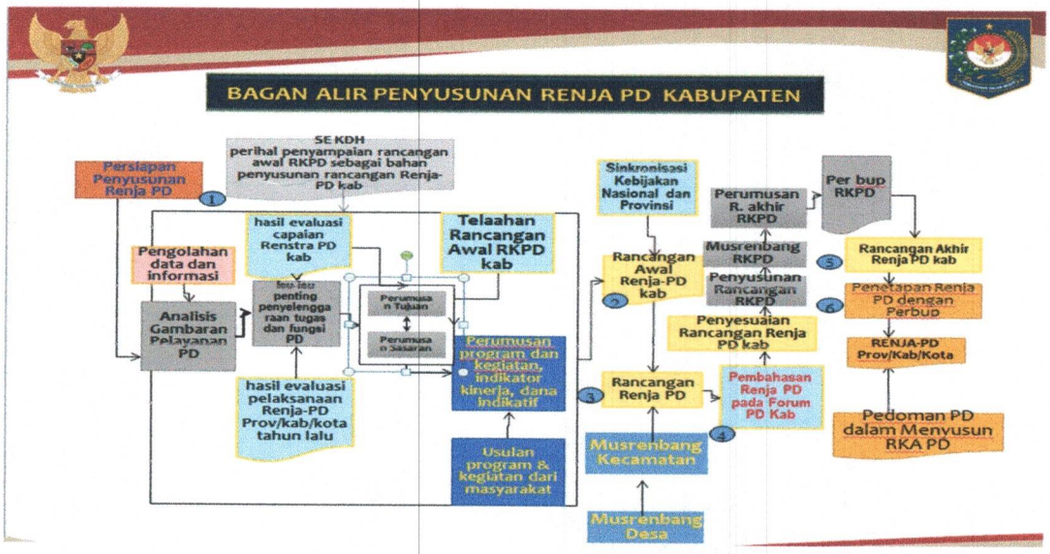

Gambar 1.2 Bagan Alir Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Seiring dengan tuntutan agar pemerintah lebih efektif dan efisien di satu sisi dan di sisi lain pihak dunia usaha dan masyarakat dapat berperan lebih besar dalam berbagai kegiatan pembangunan, maka Pemerintah Kabupaten Cirebon harus lebih memantapkan fungsinya sebagai regulator, fasilitator dan *controller* sehingga pengendalian pembangunan kepada masyarakat tetap terjaga.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 204 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerahsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Ncgara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Ncgara Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4698);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Operangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011, Seri E.5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 2 Seri E.2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038.
26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
27. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
28. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

29. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian dan Pengawasan Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen perencanaan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kurun waktu tahun 2021 yang mencakup program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
2. Sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja impact sasaran, outcome program dan output kegiatan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah;
2. Menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyusun rencana kerja dan anggaran tahun 2021;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2021 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana kerja perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu

Bab ini berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas, Review terhadap rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijaka nasional, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas, program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Gambaran kinerja Diskominfo Tahun 2020 diperoleh dari evaluasi capaian kinerja dan *e-Controlling* hingga triwulan IV. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1 untuk rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2020 hingga triwulan IV terlampir.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian program (Renstra PD Tahun 2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	NON URUSAN									
I	**Program Pelayanan Adminisrasi Perkantoran**	**Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**80 persen**	**80 persen**	**80 persen**	**80 persen**	**100**	**85 persen**		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan telekomunikasi, air, telepon	36 tagihan	36 tagihan	36 tagihan	36 tagihan	100	36 tagihan		
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas/oeprasional yang diurus perijinannya	22 unit	22 unit	22 unit	22 unit	100	22 unit		
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah luasan kantor yang dibersihkan	1896 m2	1896 m2	1896 m2	12 bulan	100	3 orang		
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100	3 jenis		
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	32 jenis	32 jenis	32 jenis	32 jenis	100	12 paket		
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	100	12 paket		
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100	30 lampu		
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 jenis	9 jenis	3 jenis	3 jenis	100	8 jenis		
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	3 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis		
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100	5280 eksemplar		
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jumlah makanan dan minuman tamu	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	300 dus		
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan atau konsultansi	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	60 laporan		
13	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Kantor	Tersedianya jumlah jasa keamanan dan ketertiban kantor	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	3 orang		
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik**	**80 persen**	**80 persen**	**80 persen**	**80 persen**	**100**	**85 persen**		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian program (Renstra PD Tahun 2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(9)	(10)	(11)
1	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeuler yang disediakan	1 jenis	8 jenis	1 unit	1 unit	100	2 jenis		
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 gedung	3 gedung	3 gedung	3 gedung	100	4 orang		
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional dalam keadaan baik	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	21 unit		
III	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-undangan**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**		
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100	12 dokumen		
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	100	13 dokumen		
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen		
IV	**Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral**	**Persentase dokumen perencanaan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	3 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	2 dokumen		
	BELANJA URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
V	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**Persentase layanan informasi dan komunikasi publik**	**52.50 persen**	**50 persen**	**52.50 persen**	**52.50 persen**	**100**	**55 persen**		
1	Produksi Konten Informasi Publik	Jumlah konten informasi publik yang dibuat dan dipublikasikan	365 konten	200 konten	365 konten	365 konten	100	365 konten		
2	Penyediaan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah layanan peningkatan kapasitas PPID dan publikasi yang disampaikan kepada masyarakat	4 layanan	2 layanan	3 layanan	3 layanan	100	4 layanan		
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	-		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian program (Renstra PD Tahun 2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(9)	(10)	(11)
4	Penyebarluasan informasi Publik melalui Media	Jumlah media yang digunakan dalam diseminasi informasi	2 media	1 media	2 media	2 media	100	2 media		
5	Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah	Jumlah media komunikasi yang dikelola	1 media	1 media	1 media	1 media	100	2100 eksemplar		
6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah diseminasi informasi melalui media tradisional dan media interpersonal	2 media	2 media	2 media	2 media	100	1 media		
7	Dukungan Administrasi Komisi Informasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Terlaksananya penanganan sengketa informasi publik di lingkup Kabupaten Cirebon	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun		
VI	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**Indeks aspek teknologi informasi dan komunikasi**	**2.97 poin**	**2.97 poin**	**2.97 poin**	**3.00 poin**	**100**	**3.10 poin**		
1	Layanan Nama Domain dan Sub Domain bagi Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Diperpanjangnya layanan domain utama dan layanan sub domain	1 domain	1 domain	1 domain	1 domain	100	1 domain		
2	Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Terintegrasi	Jumlah aplikasi umum dan khusus yang terintegrasi	2 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	100	1 aplikasi		
3	Peningkatan SDM Masyarakat Pengguna Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan/bimtek dan jumlah relawan TIK	15 orang	85 orang	15 orang	15 orang	100	130 orang		
4	Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City	Penyelenggaraan koordinasi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Cirebon Smart City	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian program (Renstra PD Tahun 2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(9)	(10)	(11)
5	Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Belanja bandwidth internet, jumlah downlaine akses dan jumlah penerima akses	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	100	1 layanan		
6	Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK	Sertifikasi Data Center dan presentase operasional Data Center	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	100	1 layanan		
7	Layanan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemerintah Daerah	Jumlah website lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan yang dapat diakses	5 website	-	5 website	5 website	100	-		
8	Operasional Cirebon Command Center	Cakupan operasional Kabupaten Cirebon Command Center	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	100	-		
	BELANJA URUSAN STATISTIK									
VII	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**Persentase dokumen hasil pengolahan dan analisis statistik sektoral yang dihasilkan**	**20 persen**	**20 persen**	**20 persen**	**20 persen**	**100**	**40 persen**		
		Persentase ketersediaan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Cirebon	**60 persen**	**60 persen**	**60 persen**	**96.10 persen**	**160.17**	**65 persen**		
1	Pengolahan Updating, Analisis Data dan Statistik Daerah	Penyelenggaraan pengolahan, updating, dan analisis data dan statistik daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen		
2	Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	Jumlah dokumen PDRB yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen		
3	Pengolahan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Presentase ketersediaan data yang dikelola	60 persen	60 persen	60 persen	96.60 persen	161	65 persen		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian program (Renstra PD Tahun 2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(9)	(10)	(11)
	BELANJA URUSAN PERSANDIAN									
VIII	**Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**	**Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah**	**6 persen**	**6 persen**	**6 persen**	**6 persen**	**100**	**9 persen**		
1	Pengembangan Layanan Keamanan Informasi	Jumlah pelayanan keamanan informasi	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	100	1 layanan		
IX	**Program Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Menara Telekomunikasi**									
1	Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi	Jumlah lokasi menara telekomunikasi yang diawasi	40 kecamatan	40 kecamatan	40 kecamatan	40 kecamatan	100	60 kali monev		

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan tingkat realisasi kinerja program dan kegiatan telah sesuai target yang ditetapkan atau 100%. Sementara tingkat realisasi kinerja yang melebihi 100 % adalah persentase keterisian data SIPD. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketercapaian kinerja yaitu adanya komitmen pimpinan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.Disamping terdapat faktor pendukung tersebut, terdapat kendala atau permasalahan yang dihadapi, diantaranya :

(1) Masih banyak Perangkat Daerah yang belum menyerahkan Daftar Informasi Publik;

(2) Tata kelola dan tindak lanjut aduan masyarakat dari masing-masing Perangkat Daerah masih rendah;

(3) Peran PPID pada Perangkat Daerah belum sepenuhnya menyadari dan memahami pentingnya mengelola informasi dan memberikan pelayanan informasi sebagai implementasi Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik;

(4) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang belum sesuai dengan kompetensi menghambat pelaksanaan pekerjaan;

(5) Terkendalanya Updating informasi tentang pembangunan Kabupaten Cirebon kepada masyarakat;

(6) Belum optimalnya manajemen data seperti data belum terkelola pada suatu sistem database dan data belum terintegrasi

(7) Belum optimalnya infrastruktur data, seperti belum semua perangkat daerah memiliki sistem atau aplikasi pengelolaan data

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfo Kabupaten Cirebon.

Pada tahun 2020 capaian kinerja Diskominfo Kabupaten Cirebon sesuai dengan target yang sudah terakomodir pada RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Indikator Kinerja Utama										
1	Indeks Domain SPBE		2.57 poin	2.67 poin	2.77 poin	2.87 poin	2.57 poin	-	-	-	
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik		56.63 poin	40 poin	45 poin	50 poin	31.87 poin	-	-	-	
3	Persentase pengelolaamn dan layanan statistik sektoral		40 persen	52.50 persen	65 persen	77.50 persen	58.05 persen	-	-	-	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Indeks Keamanan Informasi		II level	II level	II level	II level	II level	-	-	-	
5	Persentase pengaduan keberadaan menara telkomunikasi		10 persen	-	-	-	0.6 persen	-	-	-	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat		3.55 poin	3.57 poin	3.59 poin	3.61 poin	3.558 poin	-	-	-	
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
	IKK Outcome										
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik,Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		60 persen	65 persen	70 persen	75 persen	80 persen	100 persen	75 persen	80 persen	
	IKK Output										
1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya)		1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	

Nc	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
5	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
6	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
7	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
8	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
9	Persentase system elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
11	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
12	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
13	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)		11 persen	12 persen	13 persen	15 persen	16 persen	-	-	-	
14	Persentase data yang dapat berbagi pakai		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
15	Persentase perangkat daerah yang Mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
16	Persentase ASN pengelola TIK yang Tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	
17	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi egovernment		ada	ada	ada	ada	ada	-	-	-	
18	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kab/Kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kab/Kota		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	-	100 persen	100 persen	
19	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kab/Kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	-	100 persen	100 persen	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	-	100 persen	100 persen	
	URUSAN STATISTIK										
	IKK Outcome										
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	-	-	-	
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	-	-	-	
	IKK Output										
1	Tersedianya buku profil daerah		ada	ada	ada	ada	ada	-	-	-	
2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	-	-	-	
3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	-	-	-	
4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	-	-	-	
5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	-	-	-	
6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral		-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral		-	-	-	-	-	-	-	-	
	URUSAN PERSANDIAN										
	IKK Outcome										
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah		5 persen	6 persen	7 persen	8 persen	9 persen	-	-	-	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal disbanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan		50 persen	55 persen	60 persen	65 persen	50 persen	-	-	-	
2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah		50 persen	55 persen	60 persen	65 persen	50 persen	-	-	-	
3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah		50 persen	55 persen	60 persen	65 persen	50 persen	-	-	-	
4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi		9.5 persen	12 persen	15 persen	18 persen	9.5 persen	-	-	-	
	Indikator SDGs										
I	**Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan Global**										
1	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		45 orang	210 orang	390 orang	400 orang	410 orang	-	-	-	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II	**Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020**										
1	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	
2	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	
III	**Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional**										
1	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.		87 badan publik	87 badan publik	87 badan publik	87 badan publik	87 badan publik	-	-	-	
2	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.		100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	-	-	-	
3	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.		76 PPID	76 PPID	76 PPID	76 PPID	76 PPID	-	-	-	
4	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband.		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	
IV	**Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas utk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang & negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu & dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis & karakteristik lainnya yg relevan dgn konteks nasional**										
1	Proporsi individu yang menggunakan internet		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	

Interpretasi atas tabel 2.2 sebagai berikut :

- **Indikator Kinerja Utama**

  Pada tahun 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika mengampu 6 (enam) sasaran strategis dan untuk masing-masing sasaran stratgeis terdapat 1 (satu) indikator kinerja. Pada tahun 2020, ada 5 (lima) indikator telah memenuhi/melampaui target yang ditetapkan (≥100%) sehingga masuk kategori Sangat Baik dan 1 (satu) indikator yang belum mencapai target dengan tingkat capaian 56,28%. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala, yaitu :

  a) Masih banyak Perangkat Daerah yang belum menyerahkan Daftar Informasi Publik;

  b) Tata kelola dan tindak lanjut aduan masyarakat dari masing-masing Perangkat Daerah masih rendah;

c) Peran PPID pada Perangkat Daerah belum sepenuhnya menyadari dan memahami pentingnya mengelola informasi dan memberikan pelayanan informasi sebagai implementasi Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik

- **Indikator Kinerja Kunci**

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika mengampu 3 (tiga) urusan, yaitu urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Dan masing-masing urusan terdiri dari beberapa indikator kinerja kunci sebagai berikut:

Urusan Komunikasi dan Informatika

- Terdiri dari 3 IKK outcome dan 20 IKK output
- Capaian IKK outcome memenuhi target yang ditetapkan
- Hampir semua IKK output memenuhi target yang ditentukan, namun terdapat IKK output yang belum dapat disajikan capaian kinerjanya karena minimnya sumber data yang diperoleh.

Urusan Statistik

- Terdiri dari 2 IKK outcome dan 7 IKK output
- Capaian IKK outcome memenuhi target yang ditetapkan
- Hampir semua IKK output memenuhi target yang ditentukan, namun terdapat IKK output yang belum dapat disajikan capaian kinerjanya karena minimnya sumber data yang diperoleh.

Urusan Persandian

- Terdiri dari 1 IKK outcome dan 4 IKK output
- Capaian IKK outcome memenuhi target yang ditetapkan

- **SDGs**

  Berdasarkan data SDGs diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan 4 target dan 9 indikator. Pencapaian indikator tujuan SDGs pada tahun 2020 menunjukan terdapat indikator yang memenuhi target yang ditentukan. Sementara beberapa indikator lainnya belum dapat ditentukan disebabkan minimnya sumber data yang diperoleh.

2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomot 36 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tugas pokok terdapat 3 (tiga) tugas pokok yang yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informasika yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu dinas yang ada di Kabupaten Cirebon yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi sangat strategis dalam mendukung pelayanan komunikasi dan informasi, utamanya dalam mewujudkan pelayanan berbasis teknologi informasi. Hal ini tentunya juga harus didukung dengan infrastruktur yang memadai. Sehingga harapan pada lima tahun yang akan datang akan berpengaruh pada kualitas pelayanan berbasis *e–Government*. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan adanya akses informasi yang cepat, mudah dan akurat, belum diimbangi dengan pemenuhan sarana prasarana yang memadai. Selain itu Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan salah satu bentuk pelayanan publik dengan tujuan agar masyarakat dapat dilayani dalam waktu relatif cepat dan transparan. Dalam implementasinya, terdapat kendala yaitu beberapa SIM yang seharusnya bisa diintegrasikan tetapi masih belum terintegrasi dengan baik.

Dalam kaitannya dengan urusan statistik, kurang rapinya pengelolaan data juga menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Data berada di semua Perangkat Daerah dan tersebar di berbagai bidang namun apabila diperlukan khususnya terkait dengan perencanaan dan pengambilan keputusan, ternyata data yang dimaksud tidak akurat dan tidak valid. Hal ini tentunya perlu dilakukan pembenahan tata kelola data secara sistematis dan terintegrasi.

Pengamanan informasi menjadi salah satu aspek yang mendapat prioritas pada urusan persandian. Paradigma sandi melebar dan meluas dalam hubungannya dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kebutuhan terhadap SDM yang memahami pengamanan informasi secara khusus mutlak diperlukan, selain itu kesadaran Perangkat Daerah dari unsur

pimpinan sampai dengan staf terkait pengamanan informasi perlu terus ditumbuhkan.

Untuk memudahkan dalam memberikan gambaran tentang isu strategis yang dikaitkan dengan telaah terhadap visi, misi dan program kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka dapat digambarkan kerangka permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tabel 2.3

Pemetaan Permasalahan Pelayanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik belum optimal	1. Pemenuhan variabel pada domain tata kelola SPBE masih belum optimal	1. Minimnya penguasaan IT dikalanagan PNS 2. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan IT
2.	Pelayanan Informasi dan komunikasi publik belum optimal	1. Penyediaan dan diseminasi informasi publik belum optimal	1. Kurangnya sarana dan komunikasi publik dan diseminasi informasi dalam rangka terwujudnya keterbukaan informasi publik
3.	Ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral belum optimal	1. Ketersediaan data sektoral belum optimal	1. Belum optimalnya integrasi data
		2. Pemanfaatan data sektoral belum optimal	1. Masih terbatasnya pengelola data sektoral dalam mendukung terwujudnya *open government* 2. Masih rendahnya akses pubik terhadap data sektoral dalam mendukung terwujudnya *open government*
4	Pengamanan informasi pada perangkat daerah belum optimal	1. Tingginya resiko dalam kerawanan keamanan informasi	1. Belum adanya peningkatan kapasitas pengelola persandian dalam rangka peningkatan *Cyber Security* 2. Kurangnya fasilitas saraa pendukung keamanan informasi 3. Belum optimalnya pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Diskominfo adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pada dua tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan

dengan komunikasi dan informatika Kabupaten Cirebon jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Diskominfo Kabupaten Cirebon yaitu :

1. Belum optimalnya fasilitas teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik;
2. Masih rendahnya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan daerah dalam mendukung keterbukaan informasi publik;
3. Masih rendahnya integrasi dan kualitas data statistik sektoral;
4. Kurangnya pemahaman serta kesadaran keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari hasil pencermatan internal ada perbedaan antara jumlah anggaran yang diusulkan dengan jumlah anggaran pada rancangan RKPD perubahan Tahun 2021. Tetapi masih ada pergeseran anggaran antar program dan kegiatan yang perlu dilakukan karena masih adanya ketidaksesuaian wewenang tupoksi pada bidang terlampir.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses perencanaan atau planning adalah bagian dari daur kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan *(decision making)* untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangkapendek. Salah satu proses atau perencanaan yang sering dilakukan dalam melakukan pembangunan adalah dengan menggunakan sistempembangunan yang bersifat *Bottom-Up. Bottom-Up Planning* adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Dalam hal ini atasan merupakan pemerintah dan bawahan merupakan masyarakat, swasta serta pemangku kepentingan.

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon pada saat ini belum ada jaring aspirasi DPRD Kabupaten Cirebon terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Dalam hal ini belum ada usulan aspirasi masyarakat yang ikut berperan serta dalam Pembangunan Kabupaten Cirebon yang diwakilkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dilakukan sebagai acuan dan sumber masukan penting bagi pengembangan dan penentuan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

3.1.1 Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden

Visi Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin Tahun 2019-2024 adalah "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong. Pada pelaksanaannya, pencapaian visi tersebut dilakukan sesuai tugas Dinas Komunikasi dan Informatika yang disebutkan pada Peraturan Bupati Cirebon Nomot 36 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis memberi pengaruh yang sangat signifikan bagi penentuan isu strategis bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik adalah bagian penting dari perwujudan pemerintahan yang demokratis dan terpercaya. Sedangkan penerapan SPBE dan peran sebagai wali data sektoral yang handal akan menciptakan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

3.1.2 Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Renstra Kemenkominfo tahun 2020-2024 memetakan arah pembangunan nasional ke dalam 3 (tiga) tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika, yaitu :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi; dan

3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Tabel 3.1
Telaahan Sasaran Renstra
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

No	Sasaran Jangka menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kab. Cirebon	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau	Masih rendahnya dukungan keberlanjutan program dan anggaran	1. Keterbatasan anggaran 2. Masih rendahnya komitmen pengelola sumber daya komunikasi dan informatika	Adanya kesamaan fungsi dan peran
2.	Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital	Belum dijadikan priotitas	1. Keterbatasan kewenangan Kabupaten 2. Belum dilaksanakannya tata kelola layanan yang efektif	Kebutuhan akan informasi semakin tinggi
3.	Meningkatnya konektivitas layanan pos	Tidak adanya kewenangan terkait layanan pos	1. Keterbatasan kewenangan Kabupaten 2. Belum dilaksanakannya tata kelola layanan yang efektif	Kebutuhan masyarakat terhadap layanan pos, komunikasi dan informatika makin tinggi
4.	Terwujudnya konektivitas *Next Generation Broadband* nasional	Belum dijadikan prioritas	Belum terciptanya instrumen yang dapat mengembangkan NGN	Kewajiban meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
5.	Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika	Belum tersedianta standar alat, standar mutu layanan, dan mekanisme pengawasan	1. Regulasi kewenangan belum terimplementasikan 2. Keterbatasan kapasitas sumber daya	Kewajiban Perlindungan Konsumen
6.	Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi danbisnis	Masih rendahnya dukungan keberlanjutan program dan anggaran	Keterbatasan kapasitas sumberdaya	Adanya dokumen dalam mengembangkan TIK di sector ekonomi dan bisnis
7.	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital	Masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan TIK	Keterbatasan kapasitas sumberdaya	Tersedianya fasilitas digital di beberapa titik lokasi
8.	Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah	Belum dilakukan secara optimal pemanfaatan potensi bidang komunikasi dan informatika	Keterbatasan kapasitas sumber daya	Adanya Perda terkait e-government
9.	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	1. Keterbatasan Anggaran 2. Masih rendahnya komitmen pengelola sumber daya komunikasi dan informatika	Adanya kesamaan fungsi dan peran
10.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Masih rendahnya dukungan keberlanjutan program dan anggaran	Komitmen aparatur	Transparansi kinerja

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagai upaya upaya mendukung pencapaian indikator keberhasilan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Cirebon khususnya misi ke-4 yaitu Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, maka dalam RPJMD Tahun 2019-2024 telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang menjadi urusan/kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yaitu Indeks SPBE.

Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai Diskominfo Kabupaten Cirebon dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah selama tahun 2019-2024 yaitu: *"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel"*.

Tujuan tersebut menggunakan sasaran yang dijabarkan sebagai berikut:

1) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatka Teknologi Informasi dan Komunikasi
2) Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik
3) Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
4) Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
5) Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

Penjabaran tujuan dan sasaran kinerja Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.5

Tujuan dan Sasaran Diskominfo Kabupaten Cirebon

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ke -				Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.63 POIN	2.78	2.93	3.00	3.10	3.20
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatka Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2.57 POIN	2.57	2.67	2.77	2.87	2.97
		Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	55.25 PERSEN	56.63	40	45	50	57
		Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	36,50 %	40	52.50	65	77.50	90
		Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	II LEVEL	II	II	II	II	II
		Menurunnya pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi	Persentase pengaduan keberadaan menara telekomunikasi	10 PERSEN	10	-	-	-	-
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks Kepuasan Masyarakat	- POIN	3.55	3.57	3.59	3.61	3.63

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadikan bahan pertimbangan perangkat daerah dalam merumuskan program dan kegiatan adalah :

1) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Pencapaian program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Cirebon terpilih, sehingga program dan kegiatan dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati Cirebon yaitu

pada misi ke IV "Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing dipasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah".

2) Pencapaian SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Adapun program/kegiatan yang merupakan acuan untuk pencapaian SDGs yaitu tarkait urusan komunikasi dan informatika.

3) Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Demikian pula halnya dengan penanggungan kemiskinan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Program dan kegiatan yang

dirancang pada tahun anggaran 2022 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan membangun dan mengembangkan pelayanan publik berbasis IT serta pembinaan masyarakat sebagai wujud meningkatkan keterampilan di bidang IT.

4) Pencapaian NSPK dan SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Dinas Komunikasi dan informatika diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

5) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sebuah perangkat daerah di Kabupaten Cirebon memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Cirebon. Potensi itu terutama terkait dengan menara telekomunikasi yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon melalui retribusi. Selain itu, program kegiatan yang bersentuhan dengan IT seperti promosi wisata Cirebon merupakan wujud dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan

sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kabupaten Cirebon melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

3.3.2 Uraian Garis Besar mengenai Program dan Kegiatan

a. Jumlah program dan jumlah kegiatan

   Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 adalah 5 program dengan 12 kegiatan dan 43 sub kegiatan.

b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

   Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan informatika sifat penyebarannya diseluruh wilayah Kabupaten Cirebon dan melingkupi Desa/Kelurahan.

c. Total kebutuhan dana/pagu indikatof yang dirinci menurut sumber pendanaan

   Kebutuhan dana/pagu indikatif hanya bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon mengampu Urusan Unsur Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Program-program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2021 mendukung prioritas pembangunan *"Reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang prima"* sebagaimana tertuang pada RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon Tahun 2021. Adapun rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut terlampir.

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

PERANGKAT DAERAH: 2-16.2-2.2-21.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
2,	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					107.894.812.800	13.276.499.712	(94.618.313.088)		
2.16.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					106.966.768.250	12.409.741.662	(94.577.026.588)		
2.16.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		85 PERSEN	85 PERSEN	518.459.444	575.145.642	56.686.198		
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		85 PERSEN	85 PERSEN	515.114.000	522.883.000	7.769.000		
		Terpenuhinya peningkatan disiplin aparatur dalam berpakaian dinas		100 PERSEN	100 PERSEN	4.088.580.746	4.183.315.000	94.734.254		
		Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan		100 PERSEN	100 PERSEN	87.525.850	87.525.850	-		
		Persentase dokumen perencanaan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan		100 PERSEN	100 PERSEN	36.444.900	36.444.900	-		
2.16.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun		12 Dokumen	12 Dokumen	80.958.850	80.958.850	-		
2.16.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Diskominfo Kabupaten Cirebon	2 dokumen	2 dokumen	36.444.900	36.444.900	-	PIS	PIS
2.16.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Diskominfo Kabupaten Cirebon	12 dokumen	12 dokumen	44.513.950	44.513.950	-	PIS	PIS
2.16.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen dan laporan keuangan daerah yang dibuat dalam satu tahun		14 Dokumen	14 Dokumen	4.226.326.900	4.226.326.900	-		
2.16.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	Kabupaten Cirebon	23 Pegawai	23 Pegawai	4.088.580.746	4.183.315.000	94.734.254	PIS	PIS
2.16.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Diskominfo Kabupaten Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	11.001.900	11.001.900	-	PIS	PIS
2.16.01.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	Diskominfo Kabupaten Cirebon	13 dokumen	13 dokumen	32.010.000	32.010.000	-	PIS	PIS
2.16.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah jenis pakaian dinas/ pakaian khusus hari-hari tertentu beserta kelengkapannya yang disediakan		100 Jenis	100 Jenis	-	-	-		
2.16.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas / pakaian khusus hari-hari tertentu beserta kelengkapannya	Diskominfo Kabupaten Cirebon	0 stel	0 stel	-	-	-		

2.16.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah yang disediakan		9 Layanan	9 Layanan	191.093.450	191.093.450	-		
2.16.01.01.2.06 .01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah lampu yang disediakan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	30 buah	30 buah	2.385.000	2.385.000	-	PIS	PIS
2.16.01.01.2.06 .02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	9 jenis	9 jenis	74.639.000	74.639.000	-	PIS	PIS
2.16.01.01.2.06 .03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	0 jenis	0 jenis	2.466.000	2.466.000	-	PIS	PIS
		Tersedianya bahan bakar untuk genset setiap bulannya	Diskominfo Kabupaten Cirebon	331,2 liter	331,2 liter	-	-	-		
		Tersedianya isi ulang tabung gas	Diskominfo Kabupaten Cirebon	6 Tabung	6 Tabung	-	-	-		
2.16.01.01.2.06 .04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya jumlah makanan dan minuman rapat pegawai	Diskominfo Kabupaten Cirebon	180 dus	90 dus	1.800.000	900.000	(900.000)	PIS	PIS
2.16.01.01.2.06 .05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan setiap bulan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	12 paket	12 paket	9.213.000	9.213.000	-	PIS	PIS
2.16.01.01.2.06 .06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan koran lokal dan nasional	Diskominfo Kabupaten Cirebon	5.280 Eksemplar	5.280 Eksemplar	24.780.000	25.345.500	565.500	PIS	PIS
2.16.01.01.2.06 .07.	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya paket Alat Tulis Kantor setiap bulan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	12 paket	12 paket	48.004.500	48.004.500	-	PIS	PIS
2.16.01.01.2.06 .08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya jumlah makanan dan minuman tamu	Diskominfo Kabupaten Cirebon	120 dus	120 dus	1.200.000	1.200.000	-	PIS	PIS
2.16.01.01.2.06 .09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Diskominfo Kabupaten Cirebon	60 Laporan	30 Laporan	46.152.200	26.940.450	(19.211.750)	PIS	PIS
2.16.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan yang disediakan		2 Jenis	2 Jenis	6.996.000	6.996.000	-		
2.16.01.01.2.07 .02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional yang disediakan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	0 Unit	0 Unit	-	-	-		
2.16.01.01.2.07 .05.	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang disediakan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	2 jenis	2 jenis	6.996.000	6.996.000	-	PIS	PIS
2.16.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jasa penunjang urusan yang disediakan		100 Jenis	100 Jenis	794.062.192	794.062.192	-		
2.16.01.01.2.08 .02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan telekomunikasi, air dan listrik selama 1 tahun	Diskominfo Kabupaten Cirebon	36 Tagihan	36 Tagihan	283.317.744	359.550.192	76.232.448	PIS	PIS
2.16.01.01.2.08 .04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor (pramu kantor/operator komputer) setiap bulannya		4 orang	4 orang	434.368.000	434.512.000	144.000	PIS	PIS
		Tersedianya jumlah petugas jasa keamanan dan ketertiban kantor tiap bulan		3 orang	3 orang	-	-	-		
		Jumlah luasan kantor yang dibersihkan		1.896 M2	1.896 M2	-	-	-		
2.16.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis sarana dan prasarana yang dipelihara		5 Jenis	5 Jenis	105.877.000	105.877.000	-		

2.16.01.01.2.09 .01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang diberikan bahan bakar	Diskomionfo Kabupaten Cirebon	15 Unit	15 Unit	73.750.000	81.375.000	7.625.000	PIS	PIS
2.16.01.01.2.09 .02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus perijinannya	Diskominfo Kabupaten Cirebon	21 Unit	21 Unit	11.302.000	11.302.000	-	PIS	PIS
2.16.01.01.2.09 .06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan AC	Diskominfo Kab Cirebon	10 kali	10 kali	13.200.000	13.200.000	-	PIS	PIS
		Jumlah pemeliharaan komputer	Diskominfo Kab Cirebon	5 kali	5 kali	-	-	-		
		Jumlah pemeliharaan printer	Diskominfo Kab Cirebon	5 kali	5 kali	-	-	-		
		Jumlah pemeliharaan kamera	Diskominfo Kab Cirebon	0 kali	0 kali	-	-	-		
		Jumlah pemeliharaan scanner	Diskominfo Kab Cirebon	0 kali	0 kali	-	-	-		
2.16.01.01.2.09 .09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang diperbaiki	Diskominfo Kabupaten Cirebon	0 Paket	0 Paket	-	-	-		
2.16.02.	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah		65 Persen	65 Persen	2.290.518.840	2.909.489.050	618.970.210		
2.16.02.2.01.	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah media informasi dan komunikasi publik yang digunakan		5 Media	5 Media	2.943.686.050	2.943.686.050	-		
2.16.02.02.2.01 .01.	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah koordinasi bidang informasi dan komunikasi publik	Diskominfo Kabupaten Cirebon	0 tahun	0 tahun	24.999.800	-	(24.999.800)		PIS
		Jumlah peraturan daerah atau peraturan kepala daerah bidang informasi dan komunikasi publik	Diskominfo Kabupaten Cirebon	0 Regulasi	0 Regulasi	-	-	-		
		Jumlah rekomendasi hasil kegiatan Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi (SAIK)Temu Bakohumas Tk Nasional sebagai bahan perumusan kebijakan teknis	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		0 Rekomendasi	-	-	-		
		Terlaksananya Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi (SAIK) Temu Bakohumas Tk Nasional	Diskominfo Kabupaten Cirebon	1 Kegiatan	0 Kegiatan	-	-	-		
2.16.02.02.2.01 .02.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah bintek dan monitoring opini dan aspirasi publik	Diskominfo Kabupaten Cirebon	0 paket	0 paket	-	-	-		
		Jumlah bulan layanan opini dan aspirasi publik melalui media cetak	Diskominfo Kabupaten Cirebon	0 Buah	0 Buah	-	-	-		
		Jumlah bulan layanan opini dan aspirasi publik melalui media online	Diskominfo Kabupaten Cirebon	0 Buah	0 Buah	-	-	-		
		Jumlah bulan layanan opini dan aspirasi publik melalui Kelompok Informasi Masyarakat	Diskominfo Kabupaten Cirebon	0 Buah	0 Buah	-	-	-		
2.16.02.02.2.01 .04.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten informasi publik yang dibuat dan dipublikasikan	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		90 Konten	-	44.733.200	44.733.200	PIS	
		Jumlah konten informasi publik yang dibuat dan dipublikasikan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	365 Konten	275 Konten	137.696.400	105.518.200	(32.178.200)	PIS	PIS

2.16.02.02.2.01 .05.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah eksemplar majalah yang diterbitkan	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		1.050 Eksemplar	-	73.342.500	73.342.500	PIS	
		Jumlah eksemplar majalah yang diterbitkan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	2.100 Eksemplar	2.100 Eksemplar	153.800.000	153.800.000	-	PIS	PIS
		Jumlah media luar ruang yang dicetak	Diskominfo Kabupaten Cirebon	0 Lembar	0 Lembar	-	-	-		
2.16.02.02.2.01 .06.	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Diskominfo Kabupaten Cirebon	76 Badan Publik	76 Badan Publik	603.999.500	173.330.900	(430.668.600)	PIS	PIS
		Terlaksananya penyebarluasan informasi melalui pemutaran film	Diskominfo Kabupaten Cirebon	0 Kali	0 Kali	-	-	-		
		Jumlah penyebarluasan informasi melalui wawar keliling	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		10 Kali	-	2.122.200	2.122.200	PIS	
		Terlaksananya penyebarluasan informasi melalui wawar keliling	Diskominfo Kabupaten Cirebon	24 Kali	24 Kali	-	3.020.000	3.020.000	PIS	
		Jumlah terpublikasikannya program-program pembangunan dan hasil-hasil di media TV	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		3 Publikasi	-	99.924.000	99.924.000	PIS	
		Terpublikasikannya program- program pembangunan dan hasil- hasil di media TV	Diskominfo Kabupaten Cirebon	10 publikasi	10 publikasi	-	180.000.000	180.000.000	PIS	
		Jumlah terpublikasikannya program-program pembangunan dan hasil-hasil di media lain	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		30 Publikasi	-	63.572.700	63.572.700	PIS	
		Terpublikasikannya program- program pembangunan dan hasil- hasil di media lain	Diskominfo Kabupaten Cirebon	78 Publikasi	78 Publikasi	-	-	-		
2.16.02.02.2.01 .07.	Layanan Hubungan Media	Jumlah diseminasi informasi melalui media cetak	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		12 Terbit	-	399.982.500	399.982.500	PIS	
		Jumlah diseminasi informasi melalui media cetak	Diskominfo Kabupaten Cirebon	126 Terbit	124 Terbit	1.016.370.000	875.489.050	(140.880.950)	PIS	PIS
		Jumlah diseminasi informasi melalui media radio	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		1 Tayang	-	2.000.000	2.000.000	PIS	
		Jumlah diseminasi informasi melalui media radio	Diskominfo Kabupaten Cirebon	4 Tayang	3 Tayang	-	-	-		
		Jumlah diseminasi informasi melalui media TV	Diskominfo Kabupaten Cirebon	0 Tayang	0 Tayang	-	-	-		
2.16.02.02.2.01 .10.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi	Diskominfo Kabupaten Cirebon	0 Kegiatan	0 Kegiatan	120.958.940	-	(120.958.940)		PIS
		Jumlah wartawan yang menjadi peserta uji kompetensi wartawan dan mendapat sertifikat	Diskominfo Kab (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		58 orang wartawan	-	180.810.800	180.810.800	PIS	
2.16.02.02.2.01 .11.	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terpenuhinya operasional kegiatan Komisi Informasi Kabupaten Cirebon setiap bulannya	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		3 Bulan	-	76.950.400	76.950.400	PIS	

		Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	Diskominfo Kabupaten Cirebon	85 Persen	85 Persen	257.694.000	175.683.700	(82.010.300)	PIS	PIS
		Tersedianya jumlah Komisioner Komisi Informasi Kabupaten Cirebon	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		5 Komisioner	-	212.586.900	212.586.900	PIS	
2.16.02.02.2.01 .12.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah diseminasi informasi melalui media tradisional dan media interpersonal	Diskominfo Kabupaten Cirebon	0 media	0 media	135.177.800	34.197.000	(100.980.800)	PIS	PIS
		Jumlah kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Cirebon	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		1 Kali	-	86.310.000	86.310.000	PIS	
		Jumlah kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Cirebon	Diskominfo Kabupaten Cirebon	4 Kali	1 Kali	-	312.000	312.000	PIS	
2.16.03.	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	Cakupan pengelolaan aplikasi informatika		85,5 Persen	85,5 Persen	99.289.946.870	4.060.741.220	(95.229.205.650)		
2.16.03.2.01.	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		73 perangkat daerah	73 perangkat daerah	2.903.779.060	2.903.779.060	-		
2.16.03.03.2.01 .02.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain utama yang diperpanjang layanannya	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		1 Domain	-	11.771.000	11.771.000	PIS	
		Jumlah layanan domain utama dan layanan sub domain	Diskominfo Kabupaten Cirebon	1 Domain	1 Domain	-	-	-		
		Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan subdomain Instansi Penyelenggara Negara	Diskominfo Kabupaten Cirebon	0 Subdomain	0 Subdomain	49.974.000	29.613.000	(20.361.000)	PIS	PIS
		Dilaksanakannya koordinasi dengan perangkat daerah lain lintas sektor dalam rangka pelayanan berbasis elektronik	Diskominfo Kabupaten Cirebon	26 kali	15 kali	-	-	-		
2.16.03.03.2.01 .03.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		73 Perangkat daerah	-	635.534.200	635.534.200	PIS	
		Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas	Diskominfo Kabupaten Cirebon	73 Perangkat daerah	73 Perangkat daerah	2.798.186.860	2.156.900.860	(641.286.000)	PIS	PIS
		Terpenuhinya pemeliharaan jaringan TIK fiber optik yang difasilitasi Dinas Kominfo	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		3 Bulan	-	21.450.000	21.450.000	PIS	
		Jumlah pemeliharaan Fiber Optik yang difasilitasi Dinas Kominfo	Diskominfo Kabupaten Cirebon	12 Bulan	9 Bulan	-	-	-		
		Terpenuhinya pemeliharaan perangkat keras router wireless yang difasilitasi Dinas Kominfo	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		3 Bulan	-	48.510.000	48.510.000	PIS	

		Jumlah pemeliharaan router wireless yang difasilitasi Dinas Kominfo	Diskominfo Kabupaten Cirebon	12 Bulan	9 Bulan	-	-	-		
		Pengembangan infrastruktur jaringan TIK (Live Streaming fiber optik)	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		0 Unit	-	-	-		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan suku cadang fiber optik yang dibelanjakan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	39 Unit	39 Unit	-	-	-		
		Pengembangan infrastruktur jaringan TIK (WAN)	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		0 Unit	-	-	-		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan suku cadang WAN yang dibelanjakan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	37 Unit	37 Unit	-	-	-		
		Jumlah Perangkat Daerah yang terkoneksi jaringan intra pemerintah	Diskominfo Kabupaten Cirebon	73 Perangkat Daerah	73 Perangkat Daerah	-	-	-		
2.16.03.2.02.	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		9 layanan	9 layanan	1.156.962.160	1.156.962.160	-		
2.16.03.03.2.02 .01.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan Kepala Daerah yang mendukung Implementasi e- government	Diskominfo Kabupaten Cirebon	0 Regulasi	0 Regulasi	247.000.000	88.012.600	(158.987.400)	PIS	PIS
		Jumlah dokumen perencanaan e- government	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		1 Dokumen	-	43.243.400	43.243.400	PIS	
		Jumlah dokumen perencanaan e- government	Diskominfo Kabupaten Cirebon	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		
2.16.03.03.2.02 .03.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan NOC yang difasilitasi Dinas Kominfo	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		3 Bulan	-	26.400.000	26.400.000	PIS	
		Jumlah pengelolaan suku cadang NOC	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		0 Unit	-	-	-		
		Presentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan dan menyimpan data di pusat data pemerintah	Diskominfo Kabupaten Cirebon	71 Persen	71 Persen	95.463.745.560	306.989.460	(95.156.756.100)	PIS	Banprov, PIS
		Jumlah perangkat daerah yang menggunakan dan menyimpan data di pusat data pemerintah	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		73 Perangkat Daerah	-	22.113.000	22.113.000	PIS	
		Jumlah pemeliharaan NOC	Diskominfo Kabupaten Cirebon	12 Bulan	9 Bulan	-	-	-		
		Jumlah peralatan dan perlengkapan suku cadang NOC yang dibelanjakan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	32 Unit	32 Unit	-	-	-		
2.16.03.03.2.02 .04.	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan dipelihara dalam meningkatkan komunikasi berbasis elektronik Pemerintah Daerah	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		0 Aplikasi	-	-	-		
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	Diskominfo Kabupaten Cirebon	0 Persen	0 Persen	149.794.400	74.897.200	(74.897.200)	PIS	PIS

		Jumlah aplikasi yang mendukung keterbukaan informasi	Diskominfo Kabupaten Cirebon	2 Aplikasi	1 Aplikasi	-	-	-		
		Terlaksananya seminar terkait teknologi untuk masyarakat	Diskominfo Kabupaten Cirebon	90 orang	45 orang	-	-	-		
2.16.03.03.2.02 .06.	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Tersedianya sistem informasi elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Diskominfo Kabupaten Cirebon	0 sarana media	0 sarana media	64.706.000	57.335.000	(7.371.000)	PIS	PIS
		Jumlah promosi dan sosialisasi Smart City berbasis elektronik	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		1 Kegiatan	-	7.371.000	7.371.000	PIS	
		Jumlah promosi dan sosialisasi Smart City berbasis elektronik	Diskominfo Kabupaten Cirebon	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	-		
2.16.03.03.2.02 .07.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi yang dibangun dan dikembangkan dalam mendukung pemerintahan berbasis elektronik	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		2 Aplikasi	-	83.314.000	83.314.000	PIS	
		Jumlah Pembangunan sistem informasi untuk mendukung smart city	Diskominfo Kabupaten Cirebon	1 aplikasi	1 aplikasi	76.335.000	76.335.000	-	PIS	PIS
2.16.03.03.2.02 .08.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Tersedianya fasilitasi operasional Cirebon Katon Respon 112	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		1 Kegiatan	-	19.737.750	19.737.750	PIS	
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi degan sistem penghubung layanan pemerintah	Diskominfo Kabupaten Cirebon	0 Persen	0 Persen	253.720.250	164.728.950	(88.991.300)	PIS	PIS
		Jumlah titik pembangunan CCTV, videotron, video conference dan kelengkapannya	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		3 Lokasi	-	-	-		
		Jumlah aplikasi yang mendukung pelayanan masyarakat Kab Cirebon	Diskominfo Kabupaten Cirebon	2 Aplikasi	2 Aplikasi	-	-	-		
		Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah lain	Diskominfo Kabupaten Cirebon	1 tahun	1 tahun	-	-	-		
2.16.03.03.2.02 .09.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah peserta seminar dalam rangka mendukung implementasi smart city	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		70 Orang	-	2.640.000	2.640.000	PIS	
		Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city	Diskominfo Kabupaten Cirebon	71 Persen	71 Persen	99.999.900	71.906.000	(28.093.900)	PIS	PIS
		Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		3 Perangkat Daerah	-	25.453.900	25.453.900	PIS	
		Jumlah peserta seminar dalam rangka mendukung implementasi smart city	Diskominfo Kabupaten Cirebon	60 Orang	60 Orang	-	-	-		
2.16.03.03.2.02 .10.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan/bimtek	Diskominfo Kabupaten Cirebon	0 orang	0 orang	-	-	-		

		Jumlah ASN, PPPK, dan Non PNS pengelola TIK yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		204 Orang	-	32.595.200	32.595.200	PIS	
		Jumlah ASN pengelola TIK yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi	Diskominfo Kabupaten Cirebon	80 Orang	60 Orang	86.484.900	53.889.700	(32.595.200)	PIS	PIS
		Jumlah remaja dan dewasa (pelajar/masyarakat) yang dilatih dengan keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Diskominfo Kabupaten Cirebon	50 Orang	50 Orang	-	-	-		
2.16.03.03.2.02 .11.	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah aparatur yang mendapat sertifikasi kompetensi GCIO	Diskominfo Kabupaten Cirebon	0 Orang	0 Orang	-	-	-		
2.20.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**					664.255.550	626.366.150	(37.889.400)		
2.20.02.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase dokumen hasil pengolahan dan analisis statistik sektoral yang dihasilkan			40 PERSEN	-	-	-		
		Persentase ketersediaan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Cirebon			65 PERSEN	-	-	-		
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		40 Persen	40 Persen	664.255.550	626.366.150	(37.889.400)		
2.20.02.2.01.	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		32 perangkat daerah	32 perangkat daerah	626.366.150	626.366.150	-		
2.20.02.02.2.01 .01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah buku statistik daerah/profil daerah	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		1 Dokumen	-	52.589.900	52.589.900	PIS	
		Tersedianya buku statistik daerah/profil daerah	Diskominfo Kabupaten Cirebon	1 Dok	1 Dok	70.044.800	3.509.300	(66.535.500)	PIS	PIS
2.20.02.02.2.01 .03.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		1 Jenis	-	23.883.950	23.883.950	PIS	
		Persentase metadata statistik sektoral yang dibangun	Diskominfo Kabupaten Cirebon	25 Persen	25 Persen	59.918.950	36.629.200	(23.289.750)	PIS	PIS
2.20.02.02.2.01 .05.	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah aplikasi satu data yang akan dibangun dan dikembangkan	Diskominfo Kabupaten Cirebon	1 Aplikasi	1 Aplikasi	178.777.400	95.662.200	(83.115.200)	PIS	PIS
		Jumlah elemen data pada SIPD yang sudah terisi oleh perangkat daerah	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		1.350 data	-	73.217.200	73.217.200	PIS	
		Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang dikelola	Diskominfo Kabupaten Cirebon	65 Persen	65 Persen	-	-	-		
2.20.02.02.2.01 .06.	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		1 Survey	-	303.681.600	303.681.600	PIS	
		Jumlah dokumen PDRB Kec yang disusun	Diskominfo Kabupaten Cirebon	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-		
		Jumlah dokumen PDRB Kec yang disusun	Diskominfo Kabupaten Cirebon	1 Dokumen	0 Dokumen	355.514.400	37.192.800	(318.321.600)	PIS	PIS
2.21.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**					243.789.000	240.391.900	(3.397.100)		

2.21.02.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Tingkat keamanan informasi pemerintah		26 Persen	26 Persen	243.789.000	240.391.900	(3.397.100)		
2.21.02.2.01.	**Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi dan atau aplikasi persandian		18 sistem elektronik	18 sistem elektronik	182.477.600	182.477.600	-		
2.21.02.02.2.01 .02.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengamanan informasi	Diskominfo Kabupaten Cirebon	0 Paket	0 Paket	-	-	-		
2.21.02.02.2.01 .03.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi	Diskominfo Kabupaten Cirebon	0 Regulasi	0 Regulasi	-	-	-		
2.21.02.02.2.01 .04.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi/bimtek dan monev sertifikasi elektronik	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		1 Kegiatan	-	54.473.600	54.473.600	PIS	
		Jumlah sosialisasi dan monev sertifikasi elektronik	Diskominfo Kabupaten Cirebon	2 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-		
		Jumlah pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		40 Kali	-	23.742.000	23.742.000	PIS	
		Jumlah pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi	Diskominfo Kabupaten Cirebon	40 Kali	10 Kali	183.063.000	104.262.000	(78.801.000)	PIS	PIS
2.21.02.2.02.	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah titik yang diamankan pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS)		25 Titik	25 Titik	57.914.300	57.914.300	-		
2.21.02.02.2.02 .01.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya pemeliharaan jaringan santel setiap bulannya	Diskominfo Kab Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)		3 Bulan	-	9.924.000	9.924.000	PIS	
		Jumlah paket pemeliharaan jaringan Santel	Diskominfo Kabupaten Cirebon	12 Bulan	12 Bulan	60.726.000	47.990.300	(12.735.700)	PIS	PIS
		Jumlah sosialisasi dalam menyelenggarakan jaring komunikasi sandi	Diskominfo Kabupaten Cirebon	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	-		
J U M L A H						**107.894.812.800**	**13.276.499.712**	**(94.618.313.088)**		

→ 1 bidang terdiri dari 3 unsur.

- SPBE

(3) per manfaatnya.

⇒ Bidang Teknologi Informasi. (Integrasi Systems)x

* Mantik Pendahuluan Pemanfaat Dalam Integrasi Sistem *

Perpres 33 th. 2012

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Renja perubahan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon disusun sejalan dengan penjabaran dari tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam Renstra yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel."

Hasil evaluasi atas Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon tahun 2021 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja program/kegiatan adalah 100% atau dikategorikan sangat baik.

Diharapkan melalui Renja yang disusun dengan mekanisme perencanaan yang komprehensif dan terpadu ini, kinerja pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dapat semakin fokus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan aktual yang masih dihadapi saat ini.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan Renja Perubahan tahun 2021, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan supaya program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan harapan pembangunan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

a. Dalam melaksanakan Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan informatika ini seluruh aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan Renja tersebut dengan sebaik-baiknya;
b. Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Cirebon haruslah berpedoman kepada RKPD Perubahan dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;
c. Dokumen Renja Perubahan ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021;
d. Dokumen Renja Perubahan ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan, mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan, dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan instrumen pengendalian tersebut, diharapkan terjadi kesesuaian antara perencanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam target capaian pada setiap tahapan dengan pelaksanaannya, dan apabila terjadi ketidaksesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya prefentif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Komitmen, konsistensi, disiplin, kerja keras, semangat, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan di Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Cirebon mutlak diperlukan untuk tercapainya sasaran Perangkat Daerah tahun 2021.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2021 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perubahan 2019 – 2024 yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, dan sebagai bentuk perencanaan pembangunan disusun atas dasar visi,misi, tujuan, sasaran serta kebijakan – kebijakan strategis, hal ini akan digunakan sebagai implementasi kegiatan di lapangan yang diharapkan terjadi kesinergian/keterpaduan dalam rangka gerak pelaksanaan tugas dari Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Cirebon maupun seluruh *Stakeholder* sektor Perencanan pembangunan.

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Rencana Kerja (Renja) perubahan Tahun 2021, Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Cirebon, dengan berdasarkan azaz perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2021.

Sumber, Juli 2021

BUPATI CIREBON,

IMRON